



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
SURABAYA 60236

Surabaya, 17 Mei 2016

Nomor : 810/3003/212.3/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Laporan Pegawai Non PTT-PK
dan tenaga Outsourcing**

Kepada :
**Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT**

Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur Jawa Timur terkait keberadaan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) dan Tenaga *Outsourcing* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pegawai Non-PNS yang keberadaannya diakui oleh Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur adalah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK), termasuk didalamnya Pegawai BLUD Non-PNS yang telah memiliki Nomor Induk PTT-PK pada database kepegawaian.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta melakukan pendataan secara riil terhadap Pegawai Non PTT-PK dan tenaga *outsourcing* dan/atau sejenisnya di instansinya masing-masing (formulir terlampir) dan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat pada **tanggal 31 Mei 2016** melalui email: forbangjatim@gmail.com
3. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan tenaga Non PTT-PK ataupun tenaga *outsourcing* dan/atau sejenisnya yang dalam pelaksanaan rekrutmennya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Kepala SKPD yang bersangkutan akan dikenai sanksi oleh Bapak Gubernur Jawa Timur.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**
SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007

Tembusan:
Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan)

NO	SKPD
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Ketahanan Pangan
4	Badan Lingkungan Hidup
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
7	Badan Penanaman Modal
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan
10	Badan Penelitian dan Pengembangan
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13	Badan Perpustakaan dan Kearsipan
14	Bakorwil I Madiun
15	Bakorwil II Bojonegoro
16	Bakorwil III Malang
17	Bakorwil IV Pamekasan
18	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Dinas Kehutanan
21	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
22	Dinas Kesehatan
23	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	Dinas Koperasi dan UMKM
25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
26	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
27	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
28	Dinas Pendapatan
29	Dinas Pendidikan
30	Dinas Perhubungan dan LLAJ
31	Dinas Perikanan dan Kelautan
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33	Dinas Perkebunan
34	Dinas Pertanian
35	Dinas Peternakan
36	Dinas Sosial
37	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
38	Inspektorat
39	Kantor Perwakilan
40	RSU. Haji Surabaya
41	RSU. Jiwa Menur Surabaya
42	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
43	RSUD Dr. Soedono Madiun
44	RSUD Dr. Soetomo Surabaya
45	Satuan Polisi Pamong Praja
46	Biro Organisasi - Sekretariat Daerah
47	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
48	Biro Administrasi Kerjasama
49	Biro Hukum
50	Biro Administrasi Perekonomian
51	Biro Administrasi Pembangunan
52	Biro Administrasi Sumber Daya Alam
53	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
54	Biro Administrasi Kemasyarakatan
55	Biro Humas dan Protokol
56	Biro Umum
57	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
58	Sekretariat DPRD
59	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

- NAMA SKPD-

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JURUSAN	JABATAN	UNIT KERJA	SUMBER PENGAJIAN
1	“Contoh”	Bojonegoro	21 Agustus 1978	D-III	Administrasi Perkantoran	Receptionist	Sub Bagian Tata Usaha – Sekretariat	Non APBN dan Non APBD

Catatan :

1. Kolom “Unit Kerja” diisi dengan unit kerja terkecil sampai dengan eselon IV.
2. Pegawai yang dilaporkan adalah yang tidak termasuk dalam database kepegawaian (bukan PTT-PK/BLUD Non PNS).
3. Pegawai hasil kerjasama dengan pihak ketiga (seperti : cleaning service, keamanan kantor dll) tidak dilaporkan.
4. Laporan dibuat dalam format excel sesuai dengan contoh diatas.